

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberhasilan pengelolaan pariwisata tergantung pada kemampuan pariwisata tersebut dalam mengecilkan resiko dan memperbesar keuntungan. Hal tersebut dicapai dengan 2 cara, yakni menciptakan keharmonisan antara perkembangan industri pariwisata, lingkungan pariwisata, kebutuhan sosial masyarakat lokal, dan minat masyarakat lokal (Kreag, 2001; Fennel, 2003 dalam Sesotyaningtyas & Manaf, 2015) dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasar dengan kebutuhan lingkungan dan sosial masyarakat lokal melalui proses adaptasi dan re-orientasi (Pulido-fernandez, Andreas-caldito, & Sanchez-Rivero, 2014 dalam Lopez, Virto, Manzano, & Miranda, 2018). Dengan kata lain, pembangunan industri pariwisata harus memperhatikan dimensi keharmonisan antar *stakeholder* dan dimensi keberlanjutan dari pariwisata itu sendiri.

Dimensi keharmonisan antar *stakeholder* dan dimensi keberlanjutan dari pariwisata merupakan inti dari konsep pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat *World Tourism Organisation* (1993) dalam Fernandez, Azevedo, Martin, & Martin (2020) yang mengungkapkan bahwa Industri pariwisata yang berkelanjutan harus memperhatikan kebutuhan para turis dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelangsungan sumber daya yang dengannya aktivitas pariwisata tersebut dijalankan. Sejalan dengan pendapat WTO, Elkington (1993) menunjukkan 3 poin utama (dalam istilah Elkington '*bottom line*') yang menjadi fokus dalam perencanaan industri pariwisata yang berkelanjutan: pemerataan keuntungan ekonomi, tanggung-jawab sosial melalui keterlibatan masyarakat lokal, dan pemeliharaan lingkungan alam (Lope & Day, 2011).

Dengan kata lain, penggunaan paradigma industri pariwisata yang berkelanjutan merupakan suatu hal yang tidak terelakkan dalam usaha mewujudkan keberhasilan pariwisata. Inilah yang menjadi alasan peneliti untuk

memilih tema pariwisata yang berkelanjutan. Walaupun demikian, pelaksanaan industri pariwisata yang berkelanjutan memiliki tantangan-tantangan yang berasal dari lingkup bisnis industri pariwisata (Agyeiwaah, Mckercher, & Suntikul, 2017), lingkungan (Nunko & Gursoy, 2011), maupun dari sosial-kultural masyarakat lokal (Kala & Bagri, 2018). Pengaruh sosio-kultural terhadap industri pariwisata yang berkelanjutan lebih disebabkan oleh minimnya partisipasi masyarakat lokal pada pelaksanaan industri pariwisata yang berkelanjutan di daerah tersebut (Kala & Bagri, 2018).

Partisipasi yang tinggi dari masyarakat lokal dalam suatu industri pariwisata didahului oleh sikap yang positif terhadap industri pariwisata tersebut (Lee, 2013; Lopez, Virto, Manzano, & Miranda, 2018; Nunkoo & Gursoy , 2011). Untuk menjelaskan hal tersebut, para ahli pada umumnya merujuk pada *Social Exchange Theory* (SET). Sejalan dengan itu, Choi dan Murray (2010) dalam Hsu, Chen, Nyaupane, dan Lin (2020) berpendapat bahwa *Social Exchange Theory* (SET) merupakan *framework* yang paling efektif dalam menjelaskan sikap masyarakat lokal terhadap suatu industri pariwisata. *Social Exchange Theory* (SET) merupakan teori yang berada dalam ruang lingkup psikologi sosial yang dicetuskan oleh George Homans (1960). Teori tersebut menunjukkan bahwa relasi interpersonal terjadi melalui evaluasi subjektif terhadap beberapa pilihan dalam dampak positif dan negatif yang diakibatkannya (Cook & Rice, 2003 dalam Tang, 2014). Sehingga berdasarkan model SET, masyarakat lokal akan mendukung industri pariwisata yang berkelanjutan jika masyarakat tersebut mempersepsi bahwa industri pariwisata tersebut akan memberikan dampak yang positif tanpa dampak negatif yang besar (Lee, 2013).

Variabel sikap terhadap industri pariwisata yang berkelanjutan pada penelitian ini didasarkan pada penelitian Choi dan Sirakaya (2005). Penelitian Choi dan Sirakaya (2005) menghubungkan sikap masyarakat lokal dengan tujuh karakteristik industri pariwisata yang berkelanjutan: penerimaan/persepsi terhadap resiko sosial, keberlanjutan lingkungan, perencanaan jangka panjang, keuntungan ekonomi, ekonomi berbasis komunitas, kepuasan pengunjung, dan partisipasi

komunitas. Kategori sikap dalam penelitian Choi dan Sirakaya (2005) tidak hanya mencakup mendukung atau tidak mendukung, melainkan suatu disposisi perilaku. Walaupun Choi dan Srikaya (2005) memperkecil *gap* antara sikap dengan perilaku melalui perluasan konsep sikap (melampaui konsepsi mendukung atau tidak mendukung), penelitian Juvan dan Dolnicar (2014) menunjukkan bahwa *gap* tersebut lebih disebabkan oleh suatu mekanisme *belief*.

Selain itu, proses evaluasi yang dengannya seseorang menilai suatu dampak lebih positif ataupun lebih negatif melibatkan suatu proses subjektif yang spesifik. Misalnya, dalam Penelitian Nunkoo & Gursoy (2011) yang menunjukkan perbedaan kriteria pada individu dengan *occupational identity* yang tinggi dengan individu dengan *environmental identity* yang tinggi. Dengan kata lain, efektivitas *social exchange theory* dalam menjelaskan perilaku individu diperantarai oleh kondisi subjektif dalam diri individu tersebut.

Salah satu kondisi subjektif individu tersebut adalah identitas (Nunkoo & Gursoy, 2011; Teeroveengadum, 2019). Identitas merupakan suatu perangkat pemaknaan yang berperan dalam mengarahkan perilaku individu dalam sebuah situasi (Stets & Biga, 2003 dalam Teeroveengadum, 2019). Teori identitas sering digunakan untuk memprediksi perilaku *intergrouped* yang didasarkan pada kekhasan kelompok tersebut (Turner & Oakes, 1986 dalam Tang, 2014).

Identitas sebagai suatu kondisi subjektif yang dapat menunjukkan bagaimana individu menentukan sesuatu lebih berdampak positif atau negatif adalah alasan peneliti memilih identitas sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini. Perkembangan identitas seseorang terjadi dalam suatu proses sosial yang panjang dan multidimensi. Banyaknya peran dan fungsi yang ada dalam sebuah struktur sosial mengakibatkan banyaknya variasi identitas. Misalnya, identitas yang berhubungan dengan pekerjaan, identitas gender, dan *environmental identity*. Penelitian ini memilih *environmental identity* berdasarkan pertimbangan bahwa aktivitas utama masyarakat lokal di Desa Tuk-Tuk yang masih berhubungan dengan alam.

*Environmental identity* menunjukkan bagaimana pengalaman sosial individu dalam berhubungan dengan alam (Weigert, 1997 dalam Nunkoo & Gursoy, 2011). Sejalan dengan hal itu, Clayton (2003) dalam Olivos dan Aragones (2011) menjelaskan bahwa *Environmental identity* merupakan konsep yang kompleks yang di dalamnya terdapat perasaan yang dekat dengan alam, kedekatan emosional, dan nilai-nilai moral tertentu dalam hubungannya dengan *belief* bahwa alam memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kehidupan kita dan memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Walaupun identitas erat hubungannya dengan peran seseorang dalam sebuah struktur sosial, tetapi penelitian Stets dan Biga (2003) menunjukkan bahwa *environmental identity* lebih merupakan *personality identity*.

Penelitian ini memakai skala *environmental identity* yang awalnya dipakai dalam penelitian Stets dan Biga (2003) dan kemudian direplikasi oleh Nunkoo dan Gursoy (2011) dan Teerooveengadum (2019) karena skala tersebut dapat menunjukkan dimensi natural dari *environmental identity*. Skala *environmental identity* Stets dan Biga (2003) memiliki satu dimensi yaitu ekosentris. Ekosentrism dalam skala Stes dan Biga (2003) menunjukkan kedalaman pengalaman dan pemaknaan individu dalam berhubungan dan berinteraksi dengan alam.

Berdasarkan kajian-kajian literatur dan fenomena yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan konsep industri pariwisata yang berkelanjutan memerlukan suatu partisipasi masyarakat lokal yang optimal. Partisipasi masyarakat lokal mensyaratkan adanya sebuah sikap yang positif dari masyarakat lokal terhadap industri pariwisata yang berkelanjutan. Sikap positif tersebut merupakan hasil dari sebuah proses evaluasi subjektif yang di dalamnya identitas berperan signifikan. Berdasarkan karakteristik aktivitas utama masyarakat lokal di Desa Tuk-Tuk yang berhubungan dengan alam, maka peneliti memilih *environmental identity*. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran *Environmental Identity* Terhadap Sikap Pariwisata Yang Berkelanjutan Pada Masyarakat Yang Tinggal di Desa Tuk-Tuk, Samosir, Sumatera Utara". Adapun hipotesis penelitian ini adalah

terdapat hubungan positif antara *enviromental identity* dengan sikap terhadap pariwisata yang berkelanjutan pada masyarakat yang tinggal di Desa Tuk-Tuk, Samosir, Sumatera Utara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan *environmental identity* dengan sikap terhadap pariwisata yang berkelanjutan pada masyarakat yang tinggal di Desa Tuk-Tuk, Samosir, Sumatera Utara?
2. Seberapa besar sumbangsih efektif *environmental identity* mempengaruhi sikap terhadap pariwisata yang berkelanjutan pada masyarakat yang tinggal di Desa Tuk-Tuk, Samosir, Sumatera Utara?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui hubungan antara *enviromental identity* dengan sikap terhadap pariwisata yang berkelanjutan pada masyarakat yang tinggal di Desa Tuk-Tuk, Samosir, Sumatera Utara. Sementara manfaat penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat melengkapi kajian-kajian *environmental identity* dan pariwisata yang berkelanjutan yang masih minim. Dari sisi praktikal, peneliti berharap penelitian ini dapat meyakinkan pemangku kebijakan dan *stakeholder* lain (LSM, para pegiat bisnis, institusi akademik) untuk menjadikan paradigma parawisata yang berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan industri pariwisata di Pulau Samosir.